

PETA PARTISIPASI PEMILIH RIAU PADA PEMILU 2019

Nugroho Noto Susanto
(Komisioner KPU Riau 2019-2024)

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan secara deskriptif peta partisipasi pemilih Riau di Pemilu 2019. Obyek utama tulisan ini tentunya data pemilih dan partisipasi pemilih pemilu 2019. Dengan menggunakan jenis tulisan deskriptif analisis, uraian ini menemukan satu fakta menarik bahwa data pemilih laki-laki di Riau lebih tinggi daripada perempuan. Namun tingkat partisipasi perempuan justru lebih tinggi. Tingginya partisipasi pemilih perempuan di Riau, tidak berhubungan positif dengan keterpilihan calon perempuan. Calon laki-laki lebih banyak terpilih. Tulisan ini juga menemukan fakta bahwa suara tidak sah tertinggi adalah pemilu DPD RI, sedangkan suara tidak sah terendah adalah pemilu presiden/wakil presiden. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan pemilih perempuan agar keterpilihan perempuan menjadi signifikan. Kemudian partai politik yang mengusung calon perempuan juga memerhatikan aspek kualitas. Sedangkan pendidikan pemilih terkait teknis pencoblosan lebih ditingkatkan lagi untuk kategori pemilu DPD RI agar suara tidak sah dapat dikurangi.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Peta Partisipasi Pemilih, Pemilih

Perempuan, Pemilih Laki-laki, Pemilih Disabilitas, Suara sah dan Tidak Sah

Pendahuluan

Indonesia adalah salah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu ciri negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah terdapatnya pemilihan umum. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955, dan paling terakhir adalah pemilu 2019. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama diterapkan di Indonesia. Keserentakan tersebut karena menggabungkan antara pemilihan presiden/wakil presiden, dan pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelum 2019, antara pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan legislatif selalu dipisahkan.

Salah satu isu strategis yang berkembang dalam studi demokrasi dan pemilu adalah partisipasi pemilih. Pentingnya studi partisipasi pemilih, karena studi tersebut berkaitan erat dengan kesuksesan suatu penyelenggaraan pemilu. Sederhananya, semakin tinggi partisipasi pemilih, maka tingkat kesuksesan pemilu terhitung baik. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi pemilih, maka rendah pula tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Meski perlu disebut bahwa kehadiran atau tidak hadirnya pemilih tidak selamanya karena faktor peran penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, namun bisa juga ada variabel lain seperti ideologi yang dianut oleh pemilih. Beruntung di Indonesia urgensi partisipasi pemilih termaktub dalam undang-undang pemilu 2007, Peraturan KPU, dan juga peraturan Bawaslu yang mengatur soal pengawasan partisipatif.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi peta partisipasi pemilih Riau pada pemilu 2019. Dengan adanya peta partisipasi pemilih tersebut, penulis mencoba memberikan evaluasi reflektif terkait dinamika partisipasi pemilih di Provinsi Riau. Dengan demikina, tulisan ini juga bertujuan untuk

memberikan rekomendasi atas temuan yang relevan terkait dengan studi partisipasi pemilih bagi kemajuan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Batasan Teoritis Partisipasi Pemilih

Merujuk pendapat Verba dan Nie (1974) partisipasi politik warga adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk memengaruhi pilihan orang-orang untuk menduduki posisi-posisi pemerintahan dan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah". Menurut Brady (1999), partisipasi politik pemilih mencakup empat konsep dasar yaitu adanya aktivitas atau aksi, dilakukan oleh warga negara biasa, tentang politik, dan pengaruh. Verba, Scholazman, dan Brady menekankan partisipasi politik pemilih sebagai tindakan suka rela, yang berarti bahwa para warga tidak dipaksa untuk melakukannya. (1995:38-39)

Menurut Kaase dan Marsh (1979:41) partisipasi politik terdiri dari dua jenis yaitu konvensional dan tidak konvensional. Bentuk konvensional mencakup segala aktivitas oleh warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku, seperti pemungutan suara seorang calon untuk menduduki jabatan tertentu atau kampanye menjelang pemilu. Sementara partisipasi politik yang tidak konvensional adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir politik yang tidak berhubungan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik di bawah suatu rezim tertentu seperti demonstrasi, mogok kerja, boikot, dan penandatanganan petisi.

Dari definisi Verba dan Nie, Kaase dan Marsh, kita menjadi mengerti bahwa partisipasi warga dalam politik merupakan tindakan suka rela, tindakan sadar, dan tindakan tersebut dituangkan dalam dua sisi yakni konvensional (pemilu) dan tidak konvensional (kontrol publik di luar pemilu). Untuk

membatasi pembahasan, tulisan ini hanya mengulas partisipasi pemilih konvensional yang tertuang dalam prosedur baku demokrasi yakni pemilu.

Menurut Schumpeter, salah seorang ilmuwan ilmu politik terkemuka, keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang demokratis merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. (Schumpeter, 1954) Dukungan warga negara di sini dapat dimaknai salah satunya dengan kehadiran warga dalam bilik suara untuk memberikan hak pilihnya. Artinya tanpa kehadiran warga dalam bilik suara secara signifikan tentu akan mengganggu kualitas dan integritas pemilu dan demokrasi. Dari sini kita menjadi mengerti, bahwa partisipasi pemilih sesungguhnya hal paling mendasar dari tiap perbincangan tentang demokrasi dan pemilu. Mengingat filosofi fundamental dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka wajar saja jika perihal partisipasi pemilih merupakan ruh dari perhelatan pemilu. Bahkan Scholzman, dan Brady (1995:1) menyebutnya sebagai “jantung demokrasi”. Dapat kita bayangkan bagaimana jika jantung dalam tubuh kita tak berfungsi, tentulah tubuh akan mati. Begitupun demokrasi, jika pemilu tak mampu menghadirkan partisipasi pemilih secara esensial dan signifikan, maka bisa saja hakikat demokrasi menjadi mati.

Untuk itu, negara harus memberikan kebebasan bagi setiap warga untuk menyalurkan aspirasinya, pilihan politiknya. Pakar demokrasi, Cf Kaase dan Marsh (1979:28) mengingatkan, “demokrasi tidak dapat dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses bernegara”. Pendapat ini menitikberatkan pada perlunya jaminan kebebasan yang diberikan negara dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tanpa jaminan kebebasan tersebut, maka demokrasi akan menemui jalan berliku dan terjal. Bersyukur Indonesia dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, telah menjamin dalam konstitusi dan regulasi pemilu tentang kebebasan warga untuk memberikan aspirasi

politiknya. Bahkan salah satu asas dari penyelenggaraan pemilu adalah asas kebebasan yang dianyam dalam satu akronim populer “Luber Jurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Partisipasi pemilih juga berkaitan dengan legitimasi perhelatan pemilu. Kaase dan Marsh (1979:30) menitikberatkan partisipasi pemilih berhubungan dengan legitimasi demokrasi. Legitimasi berkenaan dengan keabsahan kepemimpinan yang terpilih secara politik. Semakin tinggi partisipasi warga maka makin tinggi pula legitimasi hasil pemilunya. Makin tinggi legitimasi politik, maka makin tinggi kualitas demokrasi dan keabsahan pemimpin politik yang terpilih. Dalam kata lain, selain kebebasan warga untuk menuangkan aspirasi politik, luaran pilihan yang diberikan warga adalah pemimpin yang absah, memiliki legitimasi yang kuat. Dengan pemimpin yang demikian kuat di mata rakyat, maka harapan rakyat yang ditumpangkan ke wakil-wakil rakyat di eksekutif atau legislatif, akan terwujud.

Potret Partisipasi Pemilih Nasional

Sebelum mengurai tentang peta sederhana partisipasi pemilih pemilu 2019 di Riau, terlebih dulu saya akan gambarkan potret partisipasi pemilih pemilu nasional dari periode pemilu awal hingga paling terkini. Partisipasi pemilih dalam setiap pagelaran pemilu selalu berubah dan dinamis. Sejak era reformasi digelar, tren partisipasi pemilih cenderung menurun. Partisipasi pemilih kembali meningkat pada pemilu serentak 2019. Itupun angkanya belum mencapai tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 1999, pemilu pertama pasca reformasi diberlakukan.

Jika kita tarik ke belakang lagi, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Orde Lama (1955) dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 cukup tinggi. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada

Pemilu 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi pemilih sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen. (Nugroho Noto Susanto: 2015)

Pasca rezim reformasi diberlakukan, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Namun hingga pemilu terakhir di era pasca reformasi, partisipasi pemilih ke Bilik Suara belum mampu naik kembali di angka 90-an persen. Angka partisipasi pemilih Pemilu 2004 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih semakin menurun dengan bertengger di angka 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih hanya 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Sementara itu, pada pileg 2014 partisipasi pemilih mengalami kenaikan sedikit. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11%. Sementara itu partisipasi pemilih di pilpres 2014 hanya di angka 70%. Selanjutnya lihat tabel di bawah ini tentang tingkat partisipasi pemilih nasional dalam pemilu pasca Reformasi. (Nugroho Noto Susanto:2015)

**Tingkat Partisipasi Pemilih Nasional Pemilu Pasca Reformasi
(Olah Data Penulis Dari Berbagai Sumber)**

Kategori	Kehadiran (%)	Ketidakhadiran (%)
Pileg 1999	92,6	7,4
Pileg 2004	84,1	15,9
Pilpres 2004 (Putaran I)	78,2	21,8
Pilpres 2004 (Putaran II)	76,6	23,4
Pileg 2009	70,9	29,1
Pilpres 2009	71,7	28,3
Pileg 2014	75,11	24,89
Pilpres 2014	70	30
Pilpres 2019	81,97	18,03
Pileg 2019	81,69	18,31

Dari tabel di atas tingkat partisipasi pemilih secara nasional pileg 1999 menunjukkan partisipasi pemilih yang tinggi dengan prosentase 92,6%. Antusiasme pemilih pada pemilu pertama di era reformasi ini begitu tinggi. Prosentase partisipasi ini juga secara umum menggambarkan secara nyata kesadaran politik pemilih saat itu jauh berbeda dari era Orde Baru yang selalu memobilisasi pemilih dengan intervensi aparat negara. Sementara itu pada pileg 2004 partisipasi mengalami penurunan dibandingkan dengan pileg 1999. Pada pileg 1999 partisipasi pemilih mencapai 92,6 %, sementara pileg 2004 hanya 84,1%. Pada pilpres 2004 putaran pertama partisipasi mencapai 78,2%. Partisipasi pemilih ini menurun dari pileg yang diselenggarakan dua bulan sebelumnya. Sedangkan partisipasi pada putaran kedua mencapai 76,6 % mengalami penurunan dari putaran pertama.

Tren penurunan kembali terlihat pada pileg 2009. Partisipasi pada pileg 2009 hanya mencapai 70,9% dengan tingkat golput mencapai 29,1%. Data statistik ini menunjukkan jumlah suara golput 29,1% lebih besar dari Partai Demokrat yang memenangkan pemilu dengan 20,85%. Sementara itu tingkat partisipasi pilpres 2009 meningkat tipis dari pileg mencapai 71,7 %. Terakhir pada pileg 2014 menunjukkan partisipasi mengalami peningkatan dibandingkan dari pileg 70,9% pada pileg 2009 menjadi 75,11%. Meski mengalami peningkatan, jumlah suara golput 24,89% lebih besar dari PDIP

18,95% yang menjadi pemenang pemilu. Sedangkan di pilpres partisipasi kembali menurun di angka 70%. Kabar baiknya, pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih baik pileg maupun pilpres mengalami peningkatan drastis. Meski belum menyamai tingkat partisipasi pemilih di pemilu 1999, namun pemilu serentak 2019 dengan tingkat kerumitan yang luar biasa, justru partisipasi pemilihnya menunjukkan peningkatan. Pada pemilu 2019, kategori pileg, partisipasi pemilih mencapai 81,69 persen, sementara pilpres mencapai 81,97 persen.

Peta Partisipasi Pemilih Riau

Salah satu kajian yang berkembang dalam wacana partisipasi pemilih adalah peta partisipasi pemilih. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, akademisi, dan warga perlu memberikan perhatian tentang peta partisipasi pemilih. Terlebih bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Peta partisipasi pemilih membantu kita tentang data yang berhubungan dengan naik turunnya tingkat partisipasi pemilih, studi perbandingan antar daerah, analisis perbandingan subyek partisipasi pemilih seperti pemilih laki-laki dan perempuan, pemilih milenial, pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih berbasis agama, suku, wilayah, dukungan politik, dan bahkan dari sisi usia pemilih. KPU menurut saya perlu mengembangkan suatu sistem informasi partisipasi pemilih berbasis digital untuk membaca peta partisipasi pemilih baik skala nasional, provinsi, atau kabupaten/kota bahkan hingga desa/kelurahan. Jika Bawaslu memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP), sebagai suatu alat pencegahan untuk mendeteksi potensi kerawanan, maka Peta Partisipasi Pemilih merupakan alat antisipasi sekaligus pendalaman untuk membaca, dan sekaligus rancang bangun strategi menghadapi momentum elektoral berikutnya. Dalam penyusunan peta partisipasi pemilih, keikutsertaan akademisi dan pemantau pemilu yang fokus di isu pemilu menjadi sangat penting.

Sebagai tulisan awal, artikel ini akan mengurai tentang peta partisipasi pemilih yang masih sederhana di Provinsi Riau. Peta partisipasi pemilih yang akan digambarkan adalah perbandingan data pemilih laki-laki dan perempuan, dan partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan, baik abilitas maupun disabilitas. Kemudian ulasan ini juga menggambarkan suara sah dan tidak sah. Mengingat keterbatasan sumber data, peta partisipasi pemilih ini baru dapat menggambarkan hal tersebut.

Secara umum, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi, partisipasi pemilih pemilu 2019 mengalami kenaikan signifikan. Tingkat partisipasi pemilih nasional pemilu 2019 tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan 77,5%. Angka partisipasi pemilih nasional juga melonjak 11 % dari capaian partisipasi pemilih pemilu 2014 yang berada di angka 70 %. Sementara partisipasi pemilih pada pemilu presiden/wakil presiden 2019 di Riau mencapai 84,68 %. Angka tersebut mengungguli target nasional dan capaian partisipasi pemilih nasional. Dibanding partisipasi pemilih pemilu presiden/wakil presiden 2014, pemilih Riau pada pemilu 2019 melonjak tinggi. Pada pemilu 2014, partisipasi pemilih Riau kategori pemilihan presiden/wakil presiden hanya berada di 62,75%, sehingga terdapat kenaikan partisipasi 21,93%.

Peta Partisipasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan

Untuk menguraikan peta partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan di pemilu 2019, khusus di Provinsi Riau, penulis sajikan tabel di bawah yang mendokumentasi tentang data pemilih dan partisipasi pemilih Riau pada pemilu 2019. Merujuk dari data pemilih tetap pemilu 2019 di provinsi Riau, terdapat 3.863.305 pemilih terdiri dari 1.963.287 pemilih laki-laki dan 1.900.018 pemilih perempuan. Artinya pemilih laki-laki lebih besar dari pemilih perempuan dengan perbandingan 51% pemilih laki-laki dan 49% pemilih perempuan. Dibanding data pemilih pemilu 2014, pemilih pemilu 2019 di Riau mengalami penurunan. Pada pemilu 2014, data pemilih mencapai 4.079.513 (KPU Riau:Laporan Hasil Pemilu 2014, h. 80).

Salah satu penjelasan mengapa terjadi penurunan data pemilih tersebut adalah karena adanya peningkatan kualitas akurasi data pada pemilu 2019. Seperti diketahui, data pemilih juga punya potensi persoalan yang menyertainya seperti pemilih ganda, belum cukup umur, pindah domisili, meninggal dunia, terdaftar sebagai anggota TNI/Polri, dan data tidak dikenal. Jika data pemilih berkurang pada pemilu 2019, bisa dipahami sebagai berkurangnya persoalan yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Memang, penyelenggara pemilu tidak menutup mata juga atas masih terdapatnya pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilu 2019. Data DPK memberi isyarat masih ada pemilih yang belum terdaftar di DPT.

Dari data partisipasi pemilih pemilu 2019 kategori pemilihan presiden/wakil presiden, pemilih perempuan justru lebih tinggi dari pada pemilih laki-laki baik dari sisi jumlah pemilihnya, maupun dari sisi prosentase.

Pemilih perempuan yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 1.641.153 pemilih, sedangkan laki-laki 1.630.377 pemilih. Dilihat dari prosentase, pemilih perempuan menempati posisi 50,2%, sedangkan laki-laki berada di posisi 49,8%. Dari data ini, dapat kita ambil simpulan bahwa tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Padahal jumlah data pemilih perempuan lebih rendah dari pada pemilih laki-laki. Selanjutnya lihat tabel data pemilih dan partisipasi pemilih berikut.

Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
www. Journal.kpu.go.id

KATEGORI	DAPIL	DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPTb + DPK)			TINGKAT PARMAS (%)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUM LAH
PIIPRES	RIAU	1.963.287	1.900.018	3.863.305	1.630.377	1.641.153	3.271.530	83,04	86,38	84,68
DPD RI	RIAU	1.963.287	1.900.018	3.863.305	1.624.470	1.635.552	3.260.022	82,74	86,08	84,38
DPR RI	RIAU I	1.116.840	1.086.588	2.203.428	936.735	954.273	1.891.008	83,87	87,82	85,82
	RIAU II	846.447	813.430	1.659.877	687.949	681.762	1.369.711	81,27	83,81	82,52
DPRD PROVINSI	RIAU 1	250.082	257.131	507.213	227.886	248.764	476.650	91,12	96,75	93,97
	RIAU 2	241.054	234.381	475.435	204.412	207.187	411.599	84,80	88,40	86,57
	RIAU 3	159.427	155.219	314.646	138.694	137.311	276.005	87,00	88,46	87,72
	RIAU 4	202.936	194.939	397.875	160.035	158.095	318.130	78,86	81,10	79,96
	RIAU 5	364.132	346.427	710.559	291.359	294.143	585.502	80,01	84,91	82,40
	RIAU 6	246.349	233.962	480.311	210.955	204.941	415.896	85,63	87,60	86,59
	RIAU 7	240.147	225.218	465.365	177.286	169.177	346.463	73,82	75,12	74,45
	RIAU 8	259.161	252.740	511.901	213.538	215.295	428.833	82,40	85,18	83,77

Jika kita konfirmasi dari jenis pemilih disabilitas, uraian di atas kongruen dengan temuan partisipasi pemilih disabilitas. Pada pemilu 2019, terdapat 5416 pemilih disabilitas yang terdiri 2730 pemilih laki-laki, dan 2686 pemilih perempuan. Pemilih laki-laki lebih besar dari pada pemilih perempuan. Namun partisipasi pemilih perempuan justru lebih tinggi. Pemilih laki-laki yang menggunakan hak suaranya berjumlah 1220, sedangkan pemilih perempuan 1356. Dari data ini, pemilih perempuan, baik abilitas ataupun disabilitas menempati tingkat partisipasi pemilih di atas pemilih laki-laki. Namun patut dicatat, bahwa untuk pemilih disabilitas, prosentase atau jumlah pengguna hak pilih lebih rendah daripada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari 5416 pemilih disabilitas, terdapat 2840 pemilih (52,44%) yang tidak hadir di TPS, berbanding 2576 pemilih (47,56%) yang menggunakan hak suaranya. Penyelenggara pemilu perlu mengevaluasi, mengapa pemilih disabilitas yang tidak hadir ke TPS lebih besar daripada yang hadir. Pertanyaan tersebut tentunya dapat dijawab dengan sinergi dengan akademisi dan pegiat pemilu.

Ulasan berikutnya, akan menggambarkan potret partisipasi pemilih untuk pemilu kategori DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi di Riau. Untuk pemilu

DPD RI, data pemilih di Riau sebanyak 3.863.305 terdiri 1.963.287 pemilih laki-laki, dan 1.900.018 pemilih perempuan. Dari data tersebut, terdapat 1.624.470 pemilih laki-laki (82,74%) yang menggunakan hak pilihnya, berbanding 1.635.552 pemilih perempuan (86,08%). Secara keseluruhan terdapat 84,38 % atau sebanyak 3.260.022 pemilih yang menggunakan hak suara. Sementara yang tidak hadir ke TPS terdapat 603.283 pemilih (15,62%). Dilihat dari partisipasi pemilih disabilitas, dari 4.623 total pemilih disabilitas yang terdiri 2.269 pemilih laki-laki, dan 2.354 pemilih perempuan, terdapat 1284 pemilih laki-laki (56,59%) yang menggunakan hak pilihnya, dan 1370 pemilih perempuan (57,41%). Dari data partisipasi pemilih pemilu DPD RI dapil Riau tersebut, lagi-lagi tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Dan dari 27 calon DPD RI di provinsi Riau, dimana terdapat 3 perempuan calon DPD RI dapil Riau, pemilih di Riau telah menentukan dua calon perempuan berhasil melenggang ke senayan, dua calon terpilih lainnya adalah calon laki-laki. Dari sini, kita dikonfirmasi bahwa besarnya partisipasi perempuan di pemilu DPD RI Dapil Riau 2019, berhubungan positif dengan keterpilihan calon perempuan.

Pada pemilu DPR RI, dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada, Riau hanya dibagi ke dalam dua Dapil saja. Dua dapil tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan kota Dumai masuk pada wilayah dapil satu, dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, masuk dalam wilayah dapil Riau dua. Pada dapil Riau satu terdapat pemilih laki-laki sebanyak 1.116.840, dan pemilih perempuan 1.086.588. Jumlah keseluruhan pemilih di dapil satu adalah 2.203.428. Dalam catatan KPU Riau, pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 936.735 jiwa (83,87%), sedangkan pemilih Perempuan 954.273 (87,82%). Jumlah total kehadiran baik laki-laki dan perempuan adalah 1.891.008 (85,82%).

Di Dapil Riau satu tampak pemilih perempuan lebih sedikit daripada pemilih laki-laki. Namun pengguna hak pilih di Dapil satu, justru jumlah pemilih dan tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki. Hanya saja, di Dapil 1, tidak ada satupun keterwakilan perempuan yang melenggang ke senayan. Di dapil Riau dua, terdapat pemilih laki-laki sebanyak 846.447, dan Perempuan 813.430. Total pemilih di Dapil dua sebesar 1.659.877 jiwa.

Dari sejumlah pemilih tersebut, pemilih Laki-laki yang memberikan hak suara sebanyak 687.949 jiwa (81,27%), dan pemilih perempuan yang nyoblos di TPS sebanyak 681.762 jiwa (83,81%). Total kehadiran pemilih di Dapil Riau dua adalah 1.369.711 (82,52%). Dari data pengguna hak pilih di Dapil Riau dua, kita kembali dikonfirmasi bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi secara prosentase. Namun, serupa dengan wajah politik di Dapil Riau satu, tidak ada satupun calon perempuan yang menduduki kursi wakil rakyat di Senayan. Empat calon terpilih di dapil Riau untuk pemilu DPR RI adalah laki-laki. Kalau kita komulatifkan kehadiran pemilih di pemilu kategori DPR RI Dapil Riau, terdapat 3.260.719 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dengan tingkat partisipasi sebesar 84,17%. Sementara yang tidak hadir ke TPS berjumlah 602.586 pemilih, dengan tingkat ketidakhadiran 15,83%.

Peta pemilih disabilitas pada pemilu DPR RI berbeda dengan pemilu Presiden/wakil presiden dan pemilu DPD RI. Pada pemilu DPR RI di Dapil Riau 1, terdapat pemilih disabilitas Laki-laki 1286, dan pemilih Perempuan 1377. Total pemilihnya berjumlah 2663 jiwa. Dari data tersebut, pemilih perempuan disabilitas lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Namun, tingginya pemilih perempuan tersebut konsisten dengan tingkat kehadiran pemilih perempuan di TPS. Artinya partisipasi perempuan tetap lebih tinggi daripada pemilih laki-laki.

Dari laporan KPU, pemilih laki-laki sebesar 769 jiwa (59,80%), dan pemilih Perempuan 905 jiwa (85,72%). Total kehadiran pemilih disabilitas adalah 1674 (62,89%). Sementara itu, data pemilih disabilitas di Dapil Riau dua, pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki dengan perbandingan pemilih laki-laki sebanyak 1075, dan pemilih perempuan 1105. Total pemilih disabilitas di Dapil Riau dua adalah 2180 jiwa. Dari sejumlah pemilih tersebut, tingkat partisipasi pemilih disabilitas perempuan juga lebih besar daripada pemilih laki-laki. Data kehadiran pemilih disabilitas laki-laki berjumlah 525 jiwa (48,60 %), sedangkan pemilih perempuan sebanyak 537 (48, 84%). Total kehadiran pemilih disabilitas adalah 1062 jiwa (48,72%). Dibanding tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Dapil Riau satu, tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Dapil Riau dua lebih rendah.

Sementara itu, pada pemilu serentak 2019 kategori pemilu DPRD Provinsi, di Riau terdapat 8 daerah pemilihan yang terdiri Kota Pekanbaru (dapil 1), Kabupaten Kampar (dapil 2), Kabupaten Rokan Hulu (dapil 3), Kabupaten Rokan Hilir (dapil 4), Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti (dapil 5), Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan (dapil 6), Kabupaten Indragiri Hilir (dapil 7), dan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi (dapil 8).

Dari delapan dapil pemilu DPRD Provinsi Riau tersebut, pemilih laki-laki lebih besar daripada pemilih perempuan. Terdapat pemilih laki-laki sebesar 1.963.288, dan pemilih perempuan 1.900.017. Jumlah seluruh pemilih adalah 3.863.305. Dari total pemilih itu, justru pemilih perempuan lebih banyak yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih perempuan mencapai 1.634.913 yang hadir menggunakan hak pilihnya, berbanding 1.624.165 pemilih laki-laki. Kalau diprosentasekan maka terdapat 85,94% pemilih perempuan, dan 82,96% pemilih laki-laki. Total tingkat partisipasi pemilih di kategori pemilu DPRD Provinsi adalah 3.259.078 jiwa, setara dengan 84,36% dari keseluruhan jumlah data

pemilih. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemilih yang tidak hadir ke TPS adalah 604.227 pemilih, yang setara dengan 15,64% dari total data pemilih. Namun uniknya, tingginya partisipasi pemilih perempuan di Pemilu DPRD Provinsi tahun 2019, tidak berbanding lurus dengan keterpilihan calon perempuan. Bahkan calon perempuan yang terpilih di DPRD Provinsi Riau mengalami penurunan. Jika sebelumnya, terdapat 18 wakil rakyat berasal dari calon perempuan, pemilu 2019 hanya menyisakan 12 calon perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD Provinsi Riau. Artinya, untuk konteks pemilu DPRD Provinsi Riau tidak ada hubungan signifikan antara tingginya pemilih perempuan dengan keterpilihan calon perempuan.

Kembali ke soal tingkat parmas Pemilu DPRD Provinsi Riau, jika dibandingkan antar delapan dapil di Riau, maka partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru (dapil 1) menempati posisi tingkat parmas tertinggi yakni 93,97%. Sebaliknya dapil tujuh yaitu Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi paling bawah (74,45%). Secara berurutan, tingkat partisipasi tertinggi ke terendah adalah *pertama* Dapil Riau 1 (93,97%), *kedua* Dapil Riau 3 (87,72%), *ketiga* Dapil Riau 6 (86,59%), *keempat* Dapil Riau 2 (86,57%), *kelima* Dapil Riau 8 (83,77%), *keenam* Dapil Riau 5 (82,40%), *ketujuh* Dapil Riau 4 (79,96%), dan terakhir *kedelapan* Dapil Riau 8 (74,45%).

Data pemilih disabilitas untuk delapan dapil tersebut adalah 4.598 pemilih yang terdiri dari 2.243 pemilih laki-laki, dan 2.355 pemilih perempuan. Tingginya pemilih perempuan daripada pemilih laki-laki ternyata sejalan dengan tingkat partisipasinya. Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya mencapai 1.351 pemilih, berbanding 1.188 pemilih laki-laki. Total kehadiran pemilih disabilitas adalah 2.539 jiwa yang setara dengan 61,84% dari total pemilih disabilitas.

Dilihat dari sebaran partisipasi pemilih disabilitas antara daerah pemilihan di Riau, ternyata tingkat parmas pemilih disabilitas memiliki potret yang

berbeda dengan figur tingkat partisipasi pemilih secara umum. Untuk partisipasi pemilih kategori disabilitas, tingkat partisipasi tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu (Dapil Riau 3). Konsistensi partisipasi terendah ada di kabupaten Indragiri Hilir (Dapil Riau 7). Data tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Riau untuk pemilu DPRD Provinsi Riau secara berurutan dari tingkat tertinggi ke terendah dapat dilihat berikut yaitu *pertama* Dapil Riau 3 (84,56%), *kedua* Dapil Riau 5 (78,54%), *ketiga* Dapil Riau 8 (76,38%), *keempat* Dapil Riau 6 (75,32%), *kelima* Dapil Riau empat (71,56%), *keenam* Dapil Riau 2 (47,90%), *ketujuh* Dapil Riau 1 (37,67%), dan *kedelapan* Dapil Riau 7 (22,81%). Di bawah ini disajikan tabel data pemilih disabilitas dan tingkat partisipasi pemilihnya.

KATEGORI	DAPIL	DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS (%)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
PILPRES	RIAU	2.730	2.686	5.416	1.220	1.356	2.576	44,69	50,48	47,56
DPD RI	RIAU	2.269	2.354	4.623	1.284	1.370	2.654	56,59	58,20	57,41
DPR RI	RIAU I	1286	1.377	2.663	769	905	1.674	59,80	65,72	62,86
	RIAU II	1075	1.105	2.180	525	537	1.062	48,84	48,60	48,72
DPRD PROVINSI	RIAU 1	659	663	1.322	240	258	498	36,42	38,91	37,67
	RIAU 2	215	213	428	103	102	205	47,91	47,89	47,90
	RIAU 3	124	161	285	99	142	241	79,84	88,20	84,56
	RIAU 4	108	110	218	71	85	156	65,74	77,27	71,56
	RIAU 5	293	378	671	230	297	527	78,50	78,57	78,54
	RIAU 6	249	225	474	177	180	357	71,08	80,00	75,32
	RIAU 7	340	335	675	76	78	154	22,35	23,28	22,81
	RIAU 8	255	270	525	192	209	401	75,29	77,41	76,38

Suara Sah dan Tidak Sah

Ulasan berikut ini membentangkan data suara sah dan tidak sah. Dari batasan yang diadopsi oleh KPU, suara sah dan tidak sah adalah espresi kehadiran pemilih ke TPS. Artinya meskipun terdapat suara tidak sah di

TPS, suara itu tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih. Terdapat setidaknya dua motif dari tidak sahnya suara di TPS, *pertama* faktor tidak sengaja karena ketidaktahuan pemilih tentang teknis pencoblosan yang benar; *kedua* sengaja dibuat tidak sah karena matif ideologis. Pada motif kedua, pemilih secara sengaja membuat coblosannya menjadi rusak, atau memang tidak dicoblos yang pada akhirnya tetap tersimpulkan tidak sah berdasar regulasi kepemiluan.

Jika kita bandingkan antara kategori pemilu 2019, suara tidak sah tertinggi di Riau ada di kategori pemilu DPD RI. Sedangkan suara tidak sah terendah adalah pemilu kategori presiden dan wakil presiden. Secara berurutan dari peringkat terendah hingga tertinggi, suara tidak sah pemilu serentak di Riau adalah sebagai berikut *pertama* pemilu presiden/wakil presiden sebesar 47.530 (1,45%), *kedua* pemilu DPRD Provinsi Riau sebesar 268.967 (8,27%), *ketiga* pemilu kategori DPR RI sebesar 339.490 (10,49%), dan *keempat* pemilu DPD RI sebesar 497.895 (15,27%). Tingginya suara tidak sah di pemilu DPD RI, penting menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu. Jumlah suara tidak sah yang mencapai 497.895 (15,27%), patut menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi KPU di Riau mengapa sampai terdapat suara tidak sah sebanyak itu.

Analisis awal dari data kualitatif yang bersumber dari informasi dari komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Riau yang penulis himpun, di antara jawaban mengapa tingginya suara tidak sah di kategori DPD RI adalah kebanyakan pemilih tidak terlalu antusias dengan pemilu kategori DPD RI. Di antara banyak batasan yang menyebabkan tidak sahnya suara yang telah diberikan, batasan surat suara berupa “tidak dicoblosnya” surat suara menempati posisi teratas. Akibatnya memang surat suara dihitung tidak sah.

Faktor yang menyebabkan tidak tingginya antusiasisme warga pada pemilu kategori DPD RI, adalah tidak riuhnya ruang kampanye yang dimanfaatkan

oleh calon DPD RI. Dapil yang begitu besar, dimana calon perseorangan tidak memiliki struktur organisasi yang rapi seperti partai politik, membuat banyak warga tidak mengenali calon DPD RI dengan baik. Hal itu berbeda dengan calon presiden/wakil presiden yang memang terkabarkan secara luas dan massif ke desa-desa. Akibatnya pemilih banyak mengenali calon presiden/wakil presiden, sehingga suara tidak sah untuk pemilu presiden/wakil presiden sangat kecil (1,45%). Tentu saja asumsi ini harus dikaji secara lebih mendalam, utamanya dengan penelitian yang komprehensif.

KATEGORI PEMILU	DAPIL	SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
		SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH (%)
Presiden/WakilPresiden	RIAU	3.224.000	47.530	3.271.530	1,45
DPD RI	RIAU	2.762.127	497.895	3.260.022	15,27
DPR RI	RIAU I	1.702.605	188.403	1.891.008	9,96
	RIAU II	1.218.624	151.087	1.369.711	11,03
DPRD PROVINSI	RIAU 1	450.334	26.316	476.650	5,52
	RIAU 2	375.184	36.415	411.599	8,85
	RIAU 3	256.134	19.871	276.005	7,20
	RIAU 4	290.487	27.643	318.130	8,69
	RIAU 5	533.888	51.614	585.502	8,82
	RIAU 6	381.628	34.268	415.896	8,24
	RIAU 7	312.570	33.893	346.463	9,78
	RIAU 8	389.886	38.947	428.833	9,08

PENUTUP

Kesimpulan

Dari paparan tulisan ini, tampak bahwa data pemilih laki-laki lebih besar daripada pemilih perempuan. Besarnya pemilih laki-laki di Riau, tidak bergaris lurus dengan tingginya tingkat partisipasi pemilihnya. Sebaliknya, perempuan yang data pemilihnya lebih rendah, tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi di Provinsi Riau. Hal ini dapat dimaknai bahwa kesadaran pemilih perempuan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik suara lebih besar daripada pemilih laki-laki. Potret tersebut juga terjadi di pemilih disabilitas. Pemilih laki-laki lebih besar daripada pemilih perempuan. Dan pemilih perempuan disabilitas memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi daripada pemilih disabilitas laki-laki.

Namun, keterpilihan perempuan ternyata justru lebih rendah daripada laki-laki. Keterpilihan perempuan yang mengembirakan hanya terdapat di pemilu kategori DPD RI dimana terdapat dua calon perempuan yang berhasil menduduki kursi DPD RI. Selebihnya, baik di DPR RI, DPRD Provinsi Riau, keterpilihan perempuan tidak mengembirakan. Untuk pemilu DPR RI, tidak satupun perempuan yang terpilih, sedangkan pemilu DPRD Provinsi, terdapat calon perempuan terpilih, namun jumlahnya menurun drastis dari capaian pemilu 2014. Pada pemilu 2014, 18 calon perempuan berhasil menduduki kursi parlemen. Sedangkan pada pemilu 2019 hanya tersisa 12 orang saja, dan tidak semua petahana.

Dari sisi suara tidak sah, data menunjukkan bahwa suara tidak sah di kategori pemilu DPD RI tinggi sekali, berbanding terbalik dengan pemilu presiden yang rendah sekali suara tidak sahnyanya. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu. Realitas ini perlu dijawab dengan riset yang mendalam mengapa di DPD RI suara tidak sah tinggi.

SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, beberapa hal perlu penulis sampaikan sebagai saran bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Indonesia. Beberapa saran tersebut adalah :

1. Perlu pendidikan politik yang massif di tengah pemilih perempuan
2. Perlu sosialisasi dan pendidikan pemilih di kelompok pemilih laki-laki agar bisa menggunakan hak suaranya dengan semaksimal mungkin.
3. Mengoreksi kebijakan *afirmatif action* di dalam undang-undang pemilu terkait pencalonan perempuan. Apakah sejauh ini telah memenuhi unsur substansi kualitas perempuan atau masih sebatas formalitas saja. Jika belum diperlukan upaya meningkatkan kualitas calon perempuan, khususnya oleh partai politik.
4. Penyelenggara pemilu seperti KPU perlu mengevaluasi terkait pendidikan pemilih atau sosialisasi pemilih terkait pencoblosan sehingga tidak terdapat suara tidak sah yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Brady, Hendry E. 1999. *Political Participation, Measure of political attitude.*

Edited by John R. Robinson, Philip R. Shaver, and Lawrence
S. Wrightsman. San Diego: Academic Press.

Kaase, Max, dan Alan Marsh. 1979. *Political Action : Theoretical Perspective.*

Political Action: mass participation in Five Western Democracies. Edited
by Samuel H. Barnes and Max Kaase. Beverly Hills, CA.: Sage
Publications.

KPU RIAU, Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019, dapat diunduh

di alamat [https://drive.google.com/file/d/15ESd9bpBfA_P8-
WQw0l9nGTd_PdM45OZ/view](https://drive.google.com/file/d/15ESd9bpBfA_P8-WQw0l9nGTd_PdM45OZ/view)

Laporan Hasil Pemilu 2014

Nie, Norman H., Sidney Verba, Jae-on Kim. 1974. *Political Participation and
the life Cycle” Comparative Politics 3:319-340*

Nugroho Noto Susanto (2015), *Partisipasi Pemilih Warga Negara Rokan
Hulu: Studi Kasus Pemilihan DPRD Kabupaten dan Pemilihan Presiden
tahun 2014*

Schumpeter, Yoseph. 1942 *Capitalisme, Sosialisme and Democracy.*

Newyork: Harper.